BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar

1. Pengertian Etika

Pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang mencermati mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Istilah etika dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan dengan istilah budi pekerti, cara berfikir, sikap, susila, kewajiban, sopan santun, moral, akhlak dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebenarnya etika dan moral merupakan dua kata yang berbeda dan moral disini sama halnya dengan akhlak. Meski secara konseptual dasar etika dan moral sama yaitu menilai terkait sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Dalam pemakaian kehidupan sehari-hari antara etika dan moral ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai sedangkan etika dipakai untuk mengkaji sistem-sistem nilai yang ada.[1]

Etika secara etimologi berasal dari bahasa yunani "*ethos*" yang berarti watak, adat atau sebuah kebiasaan dan sangat identik dengan moral atau akhlak. *Ethikos* yang berarti susila, kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata "etika" dibedakan dengan kata "etik" dan "*etiket*". Kata etik yang berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun *etiket* yang berarti tata cara atau

[1] A. Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Raja Grafindoo Persada, 1995), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat, sopan santun dan sebagainya dalam masyarakat serta memelihara hubungan baik sesama manusia.[2]

Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas terkait baik dan buruk atau benar dan tidaknya tingkah laku manusia serta memfokuskan atau melihat kewajiban-kewajiban manusia. *Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan namun seiring berjalannya waktu pengertian etika berubah yakni, suatu ilmu yang membahas tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia dengan memperlihatkan sejauh yang dapat dicerna oleh akal pikiran.[3]

Etika berasal dari hati nurani yang timbul bukan paksaan akan tetapi didasarkan pada *ethos*, jiwa dan semangat. *Etichs* dapat berasal dari luar diri (menyenangkan orang lain) timbul karena keterpaksaan didasarkan pada norma, kaidah dan ketentuan.[4] Etika sosial lebih luas daripada etika individual karena hampir semua kewajiban bersamaan dengan kenyataan bahwa individu tersebut adalah makhluk sosial. Etika sosial membahas norma-norma moral yang dapat menentukan sikap atau tindakan antarmanusia.

Kata lain dari etika adalah akhlak, dari bahasa arab. Dalam bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti.[5] Kata akhlak dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk tunggal. Kata *khulq* dalam firman Allah swt. merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi

---

[2] Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam* (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), 3.
[3] Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Maskawaih* (Malang: Aditya Media, 2010), 58.
[4] A. W. Widjaja, *Etika Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 8.
[5] Rahmat Jatnika, Sistem Etika Islam; Akhlak Mulia (Surabaya, Pustaka Islam, 1985), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul Allah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah swt dalam surat al-Qalam ayat 4:

Artinya: "*Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*."

Akhlak dalam Islam adalah sifat yang diperintahkan Allah kepada Muslim untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah perbuatan. Sehingga wajib bagi Muslim untuk memiliki akhlak terpuji ketika melaksanakan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Akhlak hanya bisa dilihat ketika seorang Muslim melaksanakan aktivitas tertentu seperti jujur dalam melaksankan amalan, adil dalam memimpin dan lain sebagainya. Ada kalanya seseorang memusatkan perhatian pada masalah yang sebenarrnya terkait masalah moral. Karena tanpa disadari masalah yang muncul pada ruang lingkup kehidupan ialah masalah moral dan kebutuhan manusia atas berbagai jawaban terhadap masalah etis.[6]

Menurut Aristoteles dalam buku kuliah Islam tentang etika dan keadilan sosial ada kebaikan yang dapat dicapai dengan melatih dan membiasakan dengan pengajaran terkait etika. Agar apa yang telah diajarkan yaitu kebaikan dapat dicapai semata-mata dengan berfikir, berfikir mencapai hakikat. Jika kita mempelajari al-Quran maka akan sesuai dengan surat Al-A'raaf ayat 7 yaitu:

[6] M. Yatim, *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.*"[7]

Dalam ayat tersebut Allah mengancam orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami, memakai matanya untuk melihat dan memakai telinganya untuk mendengar dengan Neraka Jahanam. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak biasa mengancam orang jika kesalahan seseorang bukan termasuk kesalahan yang besar. Karena, kesalahan ibarat sama dengan kekafiran.

Etika dalam tujuan falsafah untuk mengukur tingkah laku yang baik dan buruk dan mengetahui sejauh mana akal pikiran manusia. Namun, disini etika kemudian mengalami kesulitan karena pandangan baik dan buruk pada masing-masing golongan atau masyarakat memiliki pandangan berbeda-beda dan sifatnya pun relatif. Sedangkan akhlak adalah sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga jiwa itupun telah melekat pada sifat seseorang yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan atau dibayang-bayangkan lagi.

[7] Muchtar Lintang, *Kuliah Islam Tentang Etika dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Virginia Held dalam bukunya yang berjudul Etika Moral Pembenaran Tindakan Sosial banyak seseorang berpendapat bahwa tradisi dan agama merupakan jalan untuk mencari bimbingan dalam memecahkan permasalahan moral. Menurutnya kedua bidang ini memiliki nilai yang terbatas karena melihat setiap tradisi yang ditunjukkan seseorang masih meragukan. Semisal setiap tradisi membedakan antara pria dan wanita maka hal ini bisa saja dapat disalah artikan dimana wanita disini telah merendahkan kaum wanita atau dapat dikatakan tradisi bersifat selektif. Atau semisal mengacu pada agama sebagai sumber nilai suatu moral hal yang akan dipikirkan adalah mereka bertindak bukan atas dasar jiwa atau lahiriyah melainkan mereka bertindak atas anjuran agama.[8]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan yang etis tidak cukup disandarkan pada nilai agama dan tradisi saja. Melainkan tindakan baik buruk bisa dipelajari dari pesan moral yang disampaikan. Belakangan inipun banyak filosofi yang menaruh minat pada etika penerapan yang menangani masalah moral bukan menangani teori moral yang abstrak.[9]

2. Pengertian Politik

Pengertian politik secara etimologis, politik berasal dari kata "*polis*" yang merupakan bahasa Yunani yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan dengan kata lain yakni "*polities*" yang artinya warga negara. Secara terminologi politik banyak pendapat dari para ilmuwan diantaranya:

---

[8] Virginia Held, *Etika Moral Pembenaran Tindakan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 1991), 8.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Miriam Budiardjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses untuk menentukan sebuah tujuan-tujuan dari sistem dan menjalankannya.
b. Menurut Ramlan Surbakti politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan yang mengikat. Hal ini dengan tujuan kebaikan bersama masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.
c. Menurut F. Iswara politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan terkait masalah-masalah pelaksanaan, kontrol kekuasaan dan pembentukan kekuasaan. Politik sesungguhnya yang dimaksudkan ialah hal-hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari terkait masalah negara dan pemerintahan.[10]

Teori politik memiliki dasar moral yang fungsinya untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Fenomena politik yang terjadi dimaksudkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral. Karena, kehidupan politik yang sehat sangatlah diperlukan pedoman dan patokan.[11] Sekiranya ada lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membahas dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan

[10] F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Grafindo Persada, 1980), 23.
[11] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.[12]

Makna politik dalam Islam atau biasa digunakan di dunia Timur yakni menggunakan istilah *siyasah* sebagai pengganti istilah politik. Pemakaian kata *siyasah* jauh lebih tua atau lama dibandingkan kata politik. Siyasah berasal dari bahasa arab yang merupakan pengganti dari kata "*sasa yasusu*", pelakunya disebut "*sa'is*". Dalam artian bahwa *siyasah* adalah ilmu pemerintahan yaitu kewajiban menangani suatu yang mendatangkan kemasalahatan. Oleh karena itu, hal ini harus dipegang oleh orang yang benar-benar mengetahui betul tentang dasar-dasar pengetahuan dan peraturan dalam negara. Politik atau *siyasah* dalam Islam memiliki makna mengurus, memimpin, memerintah, menyuruh, mengelola kepentingan umum, menegakkan syari'at.[13]

Dalam tulisan Yusuf Qardhawi dengan bukunya berjudul Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam menyatakan kata *siyasah* berasal dari bahasa arab asli yang artinya kepemimpinan dan pengertian politik Islam ini berkaitan dengan pandangan ulama terdahulu yang mengartikan politik pada dua makna. *Pertama*, makna umum yaitu mengenai urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. *Kedua*, makna khusus, yang menyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan diciptakan untuk

---

[12] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2.
[13] Zainal Raharawin, "Teologi Politik Islam", *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN* (Ambon: t.p, t.th).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah kerusakan atau memecahkan masalah khusus yang terbatas dalam lingkup pemerintahan dan negara tertentu.[14]

Menurut M. Dhiauddin Rais dalam bukunya yang berjudul Teori Politik Islam menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah saw. dan kaum mukminin pada saat itu yang hidup bersama beliau di Madinah.[15] Secara praktis dapat dikatakan beliau menggunakan sistem dengan dua karakter sekaligus yakni hakikat Islam yang sempurna, baik dari segi mengurus urusan-urusan materi maupun urusan rohani serta mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Nabi Muhammad saw. diutus tidak hanya menyempurnakan akhlak manusia melainkan juga pendekatan agama terhadap politik. Para filsafatpun umumnya mengatakan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, menyatu, saling beriringan satu sama lain.[16]

B. Konsep Etika Politik

Etika terbagi menjadi dua yakni etika umum berlaku umum dan etika khusus berlaku khusus (terbatas) di kalangan tertentu. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia baik dalam falsafah Barat maupun Timur, seperti dalam Islam dan aliran-aliran pemikiran lainnya. Tapi pada prinsipinya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta sistem nilai yang terkandung di dalamnya.

---

[14] Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), 38.
[15] M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.
[16] Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.[17] Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, dan etika politik. Etika politik sebagai cabang dari etika sosial yang membahas kewajiban dan norma-norma kehidupan politik. Dimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan yang berhubungan secara politik dengan individu atau kelompok masyarakat lain.

Sebagai cabang etika lain, etika politik meletakkan dasar fundamental sebagai manusia. Yakni bahwa manusia pada hakikatnya merupakan individu dan anggota sosial sekaligus merupakan pribadi yang merdeka dan juga sebagai makhluk Tuhan. Manusia pada dasarknya adalah makhluk yang beradab dan berbudaya yang tidak bisa hidup di luar adab dan budaya tertentu. Ukuran paling utama dalam etika politik ialah harkat dan martabat manusia. Etika politik tergambarkan dari sikap dan perilaku politik suatu bangsa yang mana sesuai dengan kerangka aturan yang dapat membentuk logika berpikir individu ataupun publik demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.[18]

---

[17] K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 5.
[18] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pengertian politik yang diletakkan pada etika politik mengandung pengertian luas. Terutama dikaitkan dengan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik dan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan dari berbagai lembaga sosial, partai politik, dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua manusia dapat melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan moral dan akal pikiran. Tidak jarang seseorang melalukan tindakan yang mengutamakan egonya untuk hal yang tidak masuk akal dan tidak bermoral. Untuk itu hukum sangatlah berfungsi memberi pengertian mendasar terkait tindakan yang baik dan buruk dan mengingatkan manusia dampak dari pelanggaran yang dilakukannya.

Etika politik adalah filsafat moral yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara melainkan hukum juga berlaku atasnya. Jadi dapat dikatakan etika politik ialah menjalankan suatu sistem dengan aturan-aturan moral yang ada sehingga dari sini tidak merugikan orang atau sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga negara.

Politikus dan warga negara yang baik adalah politikus dan warga negara yang memiliki moral dan sikap yang jujur, memiliki integritas, menghargai orang lain, memiliki keprihatinan terhadap kesejahteraan umum serta kemaslahatan bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya para pejabat pemerintah saat ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka rela melanggar prinsip-prinsip moral karena ingin berkuasa, mencari kekayaan atau loyal terhadap keluarga dan golongannya saja dengan memasang wajah peduli terhadap masyarakat dan melayani kebaikan publik bukan untuk kepentingan pribadi. Sejarah kerajaan-kerajaan atau pangeran zaman dahulu mengingatkan kita kembali akan buruknya moralitas pada zaman mereka. Hal tersebut seakan muncul kembali pada zaman ini.[19]

Menurut Azyumardi Azzra penguatan etika politik tentu tidak bisa dilepaskan dari ideologi dan konstitusi. Semua gerak politik yang diperankan oleh para elite dan publik haruslah berpijak pada dua bentuk sebagai landasan berbangsa dan bernegara bahkan juga dalam interaksi menyeluruh. Jika etika politik tidak dijalankan oleh para aktor negara maka akan adanya ketidakpedulian politik yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi bisa tumbuh karena salah satunya yakni adanya apresiasi dari para elite atas aspirasi rakyat. Masyarakat disini akan benar-benar dilibatkan contohnya dalam pengambilan kebijakan dan kontrol atas pemerintahan.[20]

Sejak masa pemerintahan Orde Baru hingga saat ini berbagai peristiwa dan kasus politik memperlihatkan cara-cara politik di Indonesia yang cenderung terjerumus pada paham memisahkan realitas politik dari moralitas. Pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik dalam memperebutkan kekuasaan dan jabatan, tindakan korupsi yang melibatkan pejabat negara, penyalahgunaan keuangan

[19] Anicotes B. Sinaga, *Etos dan Moralitas Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 16.
[20] Azyumardi Azra, *Etika dan Logika Berpolitik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, dana reboisasi hutan merupakan contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia.

Di tingkat daerah proses pemilihan Gubernur atau Walikota selalu menjadi ajang pertarungan yang tidak sehat mengingat banyaknya para calon anggota dewan yang ikut dalam memainkan *money politic*. Praktek yang dilakukan seperti itu tentu menjadi sangat jauh terhadap nilai "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang secara langsung dan secara verbal para politisi dan birokrat sering menyatakan bahwa politik yang benar haruslah mengenal peringatan-peringatan moral. Politik sebagai urusan kekuasaan dan kepentingan publik perlu didasarkan atas ideal-ideal moral.[21]

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih merupakan keyakinan yang baik untuk diperjuangkan dan selalu menjadi perbincangan dalam agenda politik di setiap pergantian periode kepemimpinan. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sulit untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ketika sudah seringkali mensosialisasikan pernyataan untuk melawan korupsi dan dibentuknya tim khusus pemberantasan korupsi. Namun, tetap saja adanya praktek korupsi yang terus terjadi malah semakin tidak terhitung. Kualitas korupsi di Indonesia berada pada titik yang sangat rawan dalam penanganan tindakan korupsi.

Permasalahan suap, korupsi, ketidakjujuran dan kurangnya ketaatan dalam menjalankan tugas merupakan implikasi kemerosotan moralitas baik dari politisi maupun birokrasinya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang

[21] Sinaga, *Etos dan Moralitas*, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan masyarakat tentunya adalah agar negara mampu menjalankan sistem *check and balance* dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap kekuasaan.[22] Namun akan menjadi percuma ketika berupaya mewujudkan pemerintahan yang memiliki moralitas jika tidak ada kesadaran baik pada diri sendiri maupun secara kolektif. Dengan demikian solusi pemecahan untuk memberantas tindakan seperti korupsi tidak secara seluruhnya diberikan kepada KPK saja melainkan seluruh elemen bangsa juga ikut andil dalam pencegahan tindakan korupsi.[23]

Ada banyak hal yang dapat menghambat implikasi pemerintahan yang bersih diantaranya; *Pertama*, kesalahan dalam memilih orang-orang yang masuk dalam ranah politik seperti dalam ruang lingkup birokrasi maupun posisi pemegang kekuasaan. Meski birokrasi merupakan organisasi pelaksana pemerintah yang netral tetapi masuknya orang-orang yang salah dalam birokrasi dapat membuat posisi tersebut menjadi rawan dan mudah disalahgunakan.

Kedua, kurangnya moralitas dan pemahaman terhadap ajaran agama seperti halnya yang dinyatakan oleh Fritjof Capra bahwa krisis budaya, ekonomi, dan politik sebuah bangsa disebabkan karena rapuhnya etika politik para penguasa yang berada pada lingkup kekuasaan. Karena salah satu ukuran kualitas *good governance* adalah dengan melihat bagaimana moralitas para pemimpin politiknya.[24]

---

[22] Ibid.
[23] Sobhan Setowara dan Soimin, *Agama dan Politik Moral* (Malang: Intrans Publishing, 2013), 89.
[24] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga lemahnya rasa cinta terhadap negara (nasionalisme). Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang melanggar prinsip-prinsip moral terutama dalam berpolitik adalah orang yang telah kehilangan spirit nasionalisme. Orang yang cinta pada negaranya tidaklah mungkin untuk melakukan tindakan yang dapat membuat negaranya terpuruk. Ketika seseorang sudah dalam lingkaran dan posisi pemegang kekuasaan tidak jarang jiwa nasionalismenya hilang begitu saja demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Sebagai bentuk kepedulian etika politik, agama haruslah tetap ikut andil dalam permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sesungguhnya kualitas moral secara signifikan memberi pengaruh terhadap peluang-peluang terjadinya praktek korupsi. Agama menjadi kunci utama sebagai benteng etika atau moral sebelum melakukan aktivitas-aktivitas politik guna tidak terjebak dalam penyelewengan suatu amanah.[25]

C. Etika Politik dalam Islam

Etika politik dalam Islam adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah swt. sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Adapun penerapan etika politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus yakni dalam tatanan politik kenegaraan. Prinsip yang diajarkan Islam dapat dijadikan etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa saat ini yakni meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah,

[25] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip persamaan dan pengakuan, keadilan sosial, perlindungan bagi kaum yang lemah dan lain sebagainya.[26]

Allah swt. telah memilih dua kelompok dari golongan manusia yakni mereka para Nabi as. yang bertugas untuk memberi petunjuk kepada para hamba Allah mengenai tata cara beribadah kepada Allah dan Allah memilih para penguasa untuk menjaga hamba-hamba Allah dari penganiayaan sebagian orang dari sebagian orang lain. Kekuasaan yang mereka dapatkan ialah serta merta sebagai alat untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dimana masyarakat bergantung kepada kebijaksanaan para penguasa. Karena Allah dengan kekuasaan-Nya memberikan mereka tempat yang paling mulia. Dalam sejarah kaum majusi telah menguasai dunia selama empat ribu tahun. Dapat mempertahankan kekuasaan apabila hal itu direalisasikan dengan perilaku adil terhadap rakyatnya dan memelihara urusan-urusan secara bersama-sama. Mereka tidak akan membiarkan terjadinya ke*dzaliman*, kejahatan, dan mengelola negara secara adil. Perlu diketahui bahwa kemakmuran dan keruntuhan dunia bergantung pada para penguasanya.[27]

Persoalan etika politik merupakan sesuatu yang penting dalam agama Islam. Karena hal berikut:

1. Politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, Oleh karena itu harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah yang diniatkan dengan *lillahi*

[26] Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), 144.
[27] Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam al-Ghazali* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taala. Tidak melanggar perintah-perintah dalam beribadah karena pelanggaran terhadap prinsip ibadah akan merusak "kesucian" politik.

2. Etika politik dipandang perlu karena politik berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antara manusia misalnya saling menghormati, menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Hal inilah yang dinamakan prinsip hubungan antar manusia yang berlaku di dalam dunia politik.[28]

Hubungan yang erat antara etika politik dalam agama Islam karena dalam teori politik Islam tidak adanya pemisahan antara agama dan negara. Islam bukanlah sekedar agama tapi merupakan pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan termasuk politik. Islam menetapkan nilai-nilai dasar etika politik yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip musyawarah (*syura*)

Prinsip musyawarah tidak hanya dinilai sebagai tahap pengambilan keputusan yang direkomendasikan melainkan juga meupakan tugas keagamaan. Musyawarah dapat diartikan sebagai bertukar pendapat, ide, gagasan, dan pikiran dalam menyelesaikan masalah sebelum pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan upaya untuk mencari pandangan objektif. Dalam tradisi Islam upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak yang disebut dengan

[28] Azyumardi Azzra "Etika Politik dalam Islam", http://alwasit.net/cetak-169-etika-politik-dalam-islam.html (Sabtu, 15 April 2017, 12.28)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijma'. Hal yang terpenting dari upaya musyawarah ialah adanya jiwa persaudaraan, nurani, dan akal sehat secara bertanggungjawab.

b. Prinsip persamaan (*musawah*)

Islam tidak mengenal perlakuan diskriminasi atas dasar perbedaan suku, bangsa, status sosial, harta kekayaan dan lainnya. Satu-satunya hal yang menjadikan manusia berbeda dalam pandangan Allah ialah kualitas ketakwaan seseorang.

c. Prinsip keadilan ('*adalah*)

Prinsip keadilan, menegakkan keadilan terutama bagi penguasa. Islam memerintahkan untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggungjawab, dan bertindak sesuai dengna kontrol sosialnya sehingga dapat terwujudnya keharmonisan dan keadilan.

d. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Prinsip kebebasan dalam Islam pada dasarnya ialah sebagai tanggungjawab terakhir manusia. Konsep kebebasan harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan arah perilaku yang diatur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata manusia baik secara material maupun spiritual. Kebebasan yang dipelihara oleh politik Islam ialah kebebasan yang mengarah pada *ma'ruf* dan kebaikan.[29]

D. Dimensi-Dimensi Etika Politik

Menurut Bernhard Sutor, etika politik mengandung tiga dimensi yang menentukan dinamika politik, yakni:

[29] Jubair Situmorang, *Etika Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 57-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tujuan Politik

Dimensi tujuan politik dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam menghadapi masalah-masalah negara, kebijakan umum pemerintah harus ditetapkan dengan jelas dalam prioritas, program, metode dan pendasaran filosofinya. Atas dasar kebijakan umum ini wakil rakyat dan kelompok masyarakat dapat membuat evaluasi pelaksanaan atas kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban pemerintahan. Dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.[30]

2. Sarana Pencapaian Tujuan Politik

Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial. Hal ini menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam mengahadapi masalah-masalah dasar. Dimensi sarana mengandung dua pola normatif yaitu tatanan politik harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas maka ditata secara politik menurut prinsip keadilan.

Prinsip solidaritas diharapkan keterlibatan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam pembentukan lembaga-lembaga bantuan, asosiasi kesejahteraan dan organisasi-organisasi profesi. Solidaritas juga diartikan dalam mekanisme distribusi kekayaan melalui pajak progresif, dana solidaritas dan pendidikan sumber daya manusia.

[30] Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua prinsip antara subsidiaritas dan solidaritas diharapkan penerimaan pluralitas yang berarti menghargai ruang kebebasan politik dan kesamaan. Ruang publik tercipta apabila warga negara bertindak bersama dalam koordinasi melalui wicara dan persuasi bukan dengan kekerasan dan intimidasi. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan, institusi, dan praktik-praktik politik.

3. Aksi Politik

Tindakan politik disebut rasional apabila pelaku mempunyai orientasi situasi dan pemahaman terhadap permasalahan. Hal ini diharapkan memiliki kemampuan terhadap tanggapan beragam kepentingan yang dipertaruhkan berdasar pada kekuatan politik yang ada. Guna menghindari dan membantu memperhitungkan dampak aksi politiknya. Aksi politik yang etis ialah menghindari kekerasan dan perilaku anarkhi. Etika identik dengan tindakan rasional dan bermakna. Politik bermakna karena memperhitungkan reaksi yang lain seperti harapan, protes, kritik, persetujuan, dan penolakan terhadap pihak-pihak tertentu.[31]

[31] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id